

PERJALANAN SBSI

1. Kelahiran SBSI

Tanggal 25 April 1992 SBSI dideklarasikan. 24 – 26 April 1992 berlangsung Pertemuan Buruh Nasional (PBN) di Hotel Cipayung, Cipayung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang diikuti 107 peserta yang menjadi deklaratör. Para pesertanya terdiri dari rohaniawan, politisi, aktivis LSM/HAM dan pengurus SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tingkat PUK (Pengurus Unit Kerja), DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tingkat Kabupaten/kota), DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat Provinsi dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tingkat nasional. Hari pertama PBN tersebut adalah menyatukan sikap mendirikan sebuah Serikat Buruh yang demokratis, berdaulat, mandiri dan independen, bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Tanggal 25 April 1992 mendeklarasikan SBSI. Tanggal 26 menyusun AD/ART, Tridharma dan memilih pengurus. Saya terpilih secara aklamasi dipercayakan menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SBSI. Nama SBSI, draft AD/ART, Draft Tridharma telah dipersiapkan sebelumnya oleh sebuah Panitia dari FAS (Forum Adil Sejahtera), saya Sekretaris Eksekutif FAS yang menjadi pimpinan Panitia.

Ada tiga tingkatan Proses lahirnya SBSI. Tingkat pertama, inisiator yakni pengambil inisiatif. Setelah aktif membela buruh sejak tahun 1978, pada tahun 1990 saya berkesimpulan perlu ada sebuah Serikat Buruh yang demokratis, berdaulat, mandiri dan independen yang konsekwen memperjuangkan kepentingan buruh. Kesimpulan tersebut saya diskusikan dengan berbagai pihak terutama aktivis HAM dan perburuhan. Sebagai respon, terjadi sikap terbelah di kalangan aktivis, mendukung dan menolak.

Tingkat kedua adalah founder yakni yang menyimpulkan perlu serikat buruh bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Apa yang saya simpulkan pada tingkat pertama, saya sampaikan kepada GusDur, Sabam Sirait, Suko Waluyo dan Rachmawaty Soekarnoputri. Kami berlima sepakat mendirikan SBSI melalui sebuah acara Pertemuan Buruh Nasional, dengan pembagian peran masing-masing. Terutama peran melindungi dari ancaman pemerintahan Orde baru dipikul GusDur, Sabam Sirait, Rachmawaty Soekarnoputri dan Suko Waluyo. Kemudian saya sebagai sekretaris Eksekutif YFAS menjadi pimpinan panitia penyelenggara.

Kemudian tingkat ketiga adalah deklarator. Yakni yang 107 orang menghadiri Pertemuan Buruh Nasional menjadi deklarator berdirinya SBSI. Berlangsungnya deklarasi adalah dilaksanakan sebuah Panitia yang saya pimpin, dan pertemuan tersebutlah secara resmi mendeklarasikan berdirinya SBSI pada 25 April 1992.

Sejak kelahiran SBSI 25 April 1992, pemerintahan Soeharto menyatakan sikap anti terhadap SBSI dengan pemberian berbagai cap kepada SBSI, ilegal, komunisme baru, Organisasi Bawah Tanah, Organisasi Tanpa Bentuk dan organisasi radikal. Dampak dari semua cap tersebut, SBSI ditolak mendaftarkan sebagai Ormas sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun sebagai Serikat Buruh berdasarkan konvensi ILO no 87 dan 98. Dampak lebih lanjut, semua pengurus SBSI di tingkat perusahaan diphik atas anjuran pemerintah dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri). Beberapa kali DPP SBSI berusaha bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri, tetap gagal.

Jalan keluar dari kesulitan cap itu ada dua pilihan yakni menyerah dan membubarkan diri atau melawan dengan senjata pamungkas buruh "mogok" dan "demonstrasi" tetapi penuh dengan resiko. Dalam setiap rapat di semua tingkatan, sikap yang diputuskan adalah melawan sikap pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup itu. Terjadilah mogok dan demonstrasi hampir di seluruh provinsi, bahkan dapat dikatakan mogok dan atau demonstrasi berlangsung setiap minggu. Puncaknya DPP SBSI menyerukan mogok nasional pada Januari 1994. Lanjutan dari seruan mogok nasional berlangsung mogok tingkat provinsi di Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Tema tuntutan melaksanakan Pasal 27 UUD 1945 serta melaksanakan Konvensi ILO no 87 dan 98, yakni wujudkan upah hidup layak, stop upah minimum dan berikan jaminan kebebasan berserikat bagi buruh.

Dampak dari perlawanan itu, Marsinah mati dibunuh, walaupun Marsinah belum SBSI. Yang lainnya mati dibunuh atau dianiaya, Rusli di PT Industry Karet Deli Medan, Totok di Jakarta dan Komarudiin di PT Andatu Lampung. Tetapi kematian mereka, semakin mendorong para pengurus SBSI bangkit untuk melawan. Belajar dari pengalaman pahit berhadapan dengan pemerintahan otoriter, saya merumuskan tema perlawanan yang menjadi mengkrystal "lebih baik mati berjuang seperti Marsinah, hidupmu berguna

bagi orang lain, daripada mati ketakutan dan kurang gizi, hidupmu sia-sia.”¹ Selain korban nyawa, akibat mogok nasional, 289 pengurus SBSI dipenjarakan pada tahun 1994, termasuk saya, Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis, Togar Marbun dan banyak kawan yang lainnya.

Bersamaan dengan suasana pemerintahan Soeharto memusuhi SBSI, Ketua Umum DPP PDI Megawaty Soekarnoputri pun tidak diakui keabsahannya sebagai Ketua Umum DPP PDI oleh pemerintah. Dari semua keadaan yang dikemukakan itu, terjadilah pertemuan-pertemuan aktivis dari semua wadah, kecuali Golkar, PPP dan SPSI. Pertemuan-pertemuan dari berbagai wadah tersebut melahirkan wadah bernama MARI (Majelis Rakyat Indonesia), saya dipercayakan sebagai Ketua Umum, H. Ridwan Saidi sebagai Ketua Harian.

Setelah beberapa kali rapat MARI di YLBHI jalan Diponegoro Jakarta, keluarlah 4 Tuntutan Rakyat Menuju Pembaharuan.

1. Naikkan Pendapatan

- Upah hidup layak bagi buruh Rp. 7.000,-/hari
- Penghasilan pegawai negeri golongan terendah Rp. 600.000,-/bulan
- Penghasilan prajurit ABRI Rp. 600.000,-/bulan

2. Tingkatkan Ekonomi Rakyat

- Naikkan harga produksi pertanian
- Turunkan harga barang & jasa kebutuhan rakyat
- Pertahankan mata uang rupiah 1 USD = Rp. 2.000,-
- Bebaskan biaya pendidikan hingga SLA

3. Laksanakan Pancasila dan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen

- Cabut pake 5 UU Politik
- Perbaharui Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945
- Ciptakan tatanan masyarakat yang adil, jujur dan demokratis

4. Tegakkan Hukum dan Keadilan

- Basmi korupsi, manipulasi, kolusi, monopoli dan mafia peradilan
- Tindak tegas koruptor, manipulator dan kolutor

¹ Tentang perjalanan di lima tahun pertama, dapat dilihat dalam tulisan saya, Muchtar Pakpahan, Lima Tahun Memimpin SBSI, terbitan BIS, Jakarta, 1998.

- Adili pemecah belah bangsa

Penandatanganan 4 Tuntutan Rakyat adalah Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari: Muchtar Pakpahan, Achmad Marhaen, Soenardi, Farid Rasyd. Dewan Pelaksana terdiri dari : Ridwan Saidi dan Garda Sembiring. Alamat sekretariat MARI di Jl. Merak V/31 Blok N-3, Bintaro Jaya, Jakarta 12330, telp 7353077².

SBSI mengalami dunia yang gelap dalam hal kebebasan berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pengalaman itu, di awal tahun 1996 menghasilkan tuntutan baru yakni reformasi sebagai pelunakan kata dari revolusi. Reformasi ini menjadi materi pokok dari buku Potret Negara Indonesia, dan oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum DPP SBSI dan buku Potret Negara Indonesia diadili sebagai subversif. Saya ditangkap Jaksa Agung pada 30 Juli 1996, sebagai rangkaian peristiwa 27 Juli 1996³. Reformasi inipun diadopsi menjadi perjuangan MARI yang diawali 4 Tuntutan Rakyat yang disebut di atas.

Pada tanggal 30 Juli 1996 saya ditangkap oleh Kejaksaan Agung sebagai rangkaian peristiwa 27 Juli 1996. Dengan penangkapan itu, saya menghadapi tiga perkara sekaligus.

1. Perkara Semarang. Tanggal 10 Januari 1994, ada acara Dewan Angkatan 45 yang beranggotakan para pensiunan TNI melakukan seminar, dan saya diundang sebagai pembicara dengan tema kondisi perburuhan masa kini. Saya baru bicara 15 menit, acara dihentikan oleh aparat TNI AD dan Polri, saya bersama Sunarty dan ketua panitia pengundang ditahan di Poltabes Semarang. Waktu itu Kapoltabesnya Kol.Pol Didi Widyawadi. Saya ditahan selama 20 hari.⁴
2. Perkara demonstrasi buruh Sumatera Utara. 11 Maret 1994 28 perusahaan di Medan serentak dengan spontan mogok menuntut THR yang belum dibayarkan perusahaan. Padahal hari raya Idulfitri adalah pada tanggal 12. Salah satu yang mogok pk itu PT. Industri Karet Deli, dan Rusli salah seorang anggota PK SBSI dianiaya dan ditemukan

² Catatan ini adalah salinan lengkap dari Rincian 4 Tuntutan Rakyat Menuju Pembaharuan beserta tandatangan.

³ Muchtar Pakpahan, Potret Negara Indonesia, FAS, Jakarta, 1996. Tulisan ini jelas meminta reformasi, kalau revolusi keluarga Soeharto dapat mengalami seperti Marcos Philippina atau Ceausescu Rumania. Peristiwa 27 Juli adalah tindakan pemerintah dengan upaya paksa dan kekerasan menggunakan TNI AD mengosongkan sekretariat DPP PDI yang dipimpin Megawaty Soekarnoputri. Dengan peristiwa tersebut banyak korban yang luka dan yang meninggal.

⁴Selengkapnya silahkan baca dalam buku Rakyat Menggugat, terbitan FAS 1996.

menjadi mayat besok harinya di sungai deli yang melewati perusahaan. Tanggal 14 April, ratusan ribu buruh di Sumatera Utara dan 40.000 di Medan demonstrasi ke gubernur menuntut usut tuntas kematian Rusli, wujudkan hidup layak dan wujudkan kebebasan berserikat. Atas rekayasa pihak TNI, seorang direktur Utama meninggal, dan dilimpahkan menjadi tanggungjawab saya, padahal sewaktu kejadian saya sedang ditahan untuk pemeriksaan lanjutan di Semarang. Saya divonis bebas oleh Mahkamah Agung, tetapi Kejaksaan Agung melakukan Peninjauan Kembali, yang kemudian diterima oleh Mahkamah Agung dan saya dihukum 4 tahun penjara.⁵ Status saya menjadi narapidana berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung.

3. Perkara 27 Juli. Saya ditangkap tanggal 30 Juli 1996 jam 22.30 oleh Kejaksaan Agung sebagai dalang atau provokator kerusuhan 27 Juli. Tetapi yang diadili adalah buku Potret Negara Indonesia yang berisi kesimpulan bahwa jalan memperbaiki Indonesia adalah melalui reformasi. Kemudian kata reformasi itu dituntut sebagai perbuatan tindak pidana subversif yang diancam hukuman mati.

Dalam perjalanan perkara 27 Juli, pada persidangan Februari 1997 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya jatuh sakit. Sewaktu diperiksa secara intensif di RS PGI Cikini, saya mengidap tiga penyakit; stroke ringan yang sebelah kanan badan saya seperti lumpuh, di paruparu sebelah kanan bawah terdapat benjolan daging tumbuh atau cancer, dan ada usus buntu. Yang penting hendak dikemukakan adalah, sejak february 1997 saya opname bersatuts sebagai pasien yang sakit di Rumah Sakit PGI Cikini dan sekaligus sebagai narapidana dan tahanan politik. Selama itu pula Kamar C 10 Rumah Sakit PGI Cikini dimana saya dirawat opname menjadi tempat-tempat pertemuan semua mendiskusikan menghadirkan reformasi.

2. Reformasi

Saya masih berstatus sebagai pasien di Rumah Sakit PGI Cikini dalam status sebagai tahanan dan narapidana politik, ketika Mei 1998 saat proses reformasi berlangsung, yang puncaknya Soeharto lengser dari jabatan Presiden. 27 Mei 1998, saya mendapat surat keputusan presiden, saya dibebaskan sebagai narapidana dan sebagai Tersangka atas kasus

⁵ Selengkapnya silahkan baca dalam buku Perjuangan Politik Buruh, terbitan PT.BIS 1999.

demonstrasi buruh di Semarang dan peristiwa 27 Juli 1996. Sejak 27 Mei 1998, saya aktif kembali memimpin SBSI.

Walaupun saya dipenjarakan 5 bulan di Rutan Kejaksaan Agung, 16 bulan di LP Tanjung Gusta (14 bulan dijalani sebagai pasien di RS PGI Cikini), perlawanan untuk thema menghadirkan reformasi tetap dilanjutkan dari penjara dan rumah sakit yang dibantu kawan-kawan SBSI yang masih menghirup udara bebas. Themanya menjadikan reformasi langkah mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Soeharto lengser, lalu diganti wakil presiden BJ. Habibie menjadi Presiden. Menanggapi naiknya BJ Habibie menjadi presiden, terdapat dua pendapat di kalangan aktivis reformasi. Kelompok I, berpendapat jatuhkan Habibie dan bentuk Presidium Kabinet dan Kelompok II menerima Habibie sebagai presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilihan umum secepatnya di tahun 1999. Terhadap dua pendapat tersebut, SBSI berada pada pendapat kedua.

Sebagai Ketua Umum DPP SBSI, saya memikirkan langkah strategis yang harus ditempuh SBSI mempergunakan reformasi sebagai momentum mewujudkan welfarestate untuk mensejahterakan rakyat. Bersamaan dengan berlangsungnya reformasi, perburuhan Indonesia sedang memasuki era kebebasan berserikat yang memunculkan serikat-serikat buruh baru. Kalau sebelumnya hanya ada tiga Serikat Buruh yang beraktivitas yakni SPSI, SBSI, FNPBI, muncul serikat serikat buruh baru memasuki era reformasi.

Dalam rangka mengisi reformasi, saya merencanakan membangun sebuah hubungan industrial atau hubungan perburuhan dalam sebuah sistem yang berthemakan "perusahaan beruntung, buruh makmur/sejahtera, dan ekonomi negara kuat dalam welfarestate". Untuk itu saya mempersiapkan 7 draft RUU perburuhan, yang dimatangkan dalam TRUP (Tim Reformasi Undang-Undang Perburuhan) SBSI dan kemudian dimatangkan lagi dalam FSUI (Forum Solidaritas Union Indonesia) yang berangotakan semua Serikat Buruh di tahun 1998-1999. Nama dari Hubungan Industrial Indonesia itu adalah : Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Demokratis, Berkeadilan dan Berkesejahteraan. 7 draft RUU tersebut adalah 1. Draft RUU tentang Serikat Buruh, kemudian menjadi UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh . 2. RUU Pengupahan 3. RUU Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 4. RUU Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 5.

Pendidikan dan pelatihan. Kemudian di DPR-RI Empat Draft RUU (Pengupahan, PHK, PKB dan Pendidikan Pelatihan) digabung menjadi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Draft RUU Pengadilan Perburuhan menjadi UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan 7. Draft RUU Jaminan Sosial Buruh, yang dalam perjalanan panjang yang lahir adalah UU no 40 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian melahirkan UU no 28 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Secara keseluruhan yang 7 draft setelah menjadi Undang-undang, cita-cita welfarestate gagal dicapai secara juridis. Apalagi dengan masuknya Outsourcing, buruh kontrak dan memphk secara mudah dalam sistem perundang-undangan perburuhan, pastilah tidak tercapai hubungan industrial yang harmonis yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Kesimpulan ini menjadi kenyataan setelah 18 tahun usia reformasi saat tulisan ini ditulis.

Mendapati kenyataan dengan semua proses politik melahirkan UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menimbulkan kesadaran baru, buruh membutuhkan sebuah Partai Politik yang berideologi sosial demokrat, berposisi kiri tengah, bercita-cita mewujudkan welfarestate, yang pilihannya jaminan kerja (bukan pertumbuhan ekonomi), dan mempedomani trisakti Soekarno. Kesadaran baru membutuhkan sebuah Partai Politik ini makin lengkap manakala seorang pengusaha Setiawan Djodi mendorong lahirnya Partai Buruh serta menyatakan kesediaannya membiayai, maka SBSI memprakarsai lahirnya Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) pada 1 Mei 2001, Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Dr. Irjenpol (purn) Bibit Ryanto dan Sekretaris Jenderal Ir. Seno Aji (adiknya Setiawan Djodi).

Cita-cita pengorganisasian PBSD memilih mengikuti pola kerja NTUC (National Trade Union Confederation) dengan Labour Party atau Partai Buruh di Selandia Baru. Semua hal strategis yang menjadi keputusan atau kebijakan Partai Buruh diputuskan NTUC. Partai Buruh bertanggungjawab kepada NTUC, sedangkan NTUC bertanggungjawab kepada buruh sebagai konstituen utama, dan kehadiran Partai Buruh adalah untuk kepentingan buruh sebagai konstituen utama. Petugas politik dari Partai Buruh dilarang mencari uang untuk partai. Biaya kegiatan partai buruh berasal dari iuran NTUC. Pilihan memilih negara Selandia Baru, karena kenyataan Selandia

Baru adalah negara welfarestate, rakyatnya tergolong paling makmur di dunia, dan setiap tahun masuk dalam kategori bersih dari korupsi bersama negara-negara Singapura, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark.

Tetapi di tahun 2002 menjelang Kongres I PBSB, Bibit Ryanto mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP PBSB. Timbul pembicaraan serius di internal DPP SBSI, PBSB diteruskan atau dibiarkan mati suri. Kesimpulannya diteruskan, tetapi Muchtar Pakpahan harus menjadi Ketua Umum. Sehingga pada Kongres I PBSB Oktober 2002 menghasilkan Ketua Umum DPP PBSB Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA dan Sekretaris Jenderal Drg. Diah Indriastuti. Kenyataan PBSB gagal mendapatkan kursi di DPRRI pada pemilihan umum 2004.

3. SBSI Menjadi Tiga

Masa Kerja Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum DPP SBSI adalah 2000-2004. Tetapi karena terpilih sebagai Ketua Umum DPP PBSB, maka saya harus melepaskan jabatan Ketua Umum DPP SBSI. Untuk itu diadakanlah Kongres IV SBSI pada April 2003, dipercepat satu tahun.

Menjelang Kongres IV, topik yang paling menarik dan paling hangat dibicarakan dan sekaligus menentukan masa depan SBSI adalah siapa Ketua Umum DPP SBSI pengganti Muchtar Pakpahan. Ada dua calon Sunarti dan Rekson Silaban. Keduanya memiliki plus minus. Sunarti adalah pendiri, setia komit dan berani menjalankan perjuangan dan sedang menjadi anggota MPR 1999-2004 mewakili buruh sebagai plusnya. Minusnya, berpendidikan rendah tamat SMP. Rekson Silaban berpendidikan S1, cerdas dan mendapat dukungan internasional sebagai plusnya. Minusnya, tidak pendiri, tidak setia, tidak komit dan tidak berani.

Dalam memproses pengganti saya itu, saya diminta untuk tidak memihak. Dalam pergumulan batin saya beberapa bulan, saya berpendapat saya harus ikut bertanggungjawab menentukan siapa memimpin SBSI ke depan. Dalam suatu pertemuan dengan Sunarti menjelang Kongres IV, saya beritahukan pilihan saya adalah Rekson Silaban. Pada saat itu juga Sunarti menegaskan "saya akan keluar dari SBSI, dan nanti bapak akan menyesal karena akan dihianati lagi".

Pada Kongres IV SBSI terjadilah hal berikut;

1. Sunarti dan kawan-kawan tidak hadir, mereka mengadakan Kongres di Hotel Rolex dengan menghasilkan SBSI92.
2. Menyesuaikan diri dengan UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, SBSI menjadi KSBSI, tetapi ADS/ART tetap sama seperti sebelumnya, satu AD/ART untuk semua KSBSI.
3. Rekson Silaban terpilih menjadi Ketua Umum dan Idin Rosidin sebagai Sekretaris Jenderal, dan saya sebagai Ketua MPO.

Sejak Mei 2003 SBSI menjadi dua, KSBSI dan SBSI92. Waktu serah terima DPP SBSI dari saya kepada Rekson Silaban, SBSI memiliki anggota 1,7 juta dan memiliki struktur aktif di semua (27) provinsi.

Kalau di awal serah terima, saya berfikir masih dapat intens sebagai Ketua MPO, ternyata kesibukan sebagai Ketua Umum DPP PBSB/Partai Buruh, menyita waktu, pikiran dan dana sehingga SBSI terlepas dari perhatian. Sering ada laporan atau informasi tentang masalah internal dari daerah, saya teruskan ke DPP SBSI, saya kira ditindaklanjuti, ternyata tidak.

Di tahun 2010 setahun menjelang Kongres VI, saya menemukan beberapa fakta di KSBSI. Kenyataannya anggota KSBSI melorot tinggal hanya 316.000 dan kosong 13 provinsi (1. Sumatera Barat 2. Bangka Belitung 3. Bengkulu 4. Yogyakarta 5. Sulawesi Tenggara 6. Gorontalo 7. Sulawesi Barat 8. Bali 9. Nusa Tenggara barat 10. Nusa Tenggara Timur 11. Maluku Utara 12. Papua). Padahal sebelumnya di beberapa provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, NTB dan Papua SBSI adalah Serikat terkuat dan berpengaruh. Saya temukan lagi di dalam tubuh KSBSI ada 12 AD/ART, beda AD/ART KSBSI dengan masing-masing federasi yang membuat tidak ada garis komando dari KSBSI ke federasi-federasi. Saya berusaha mengembalikan AD/ART tersebut, tetapi saya gagal, bahkan ide itu menjadi asing di sebagian besar KSBSI. Salah satu yang menjadi asing, yang dinilai kesuksesan adalah mendatangkan dana dari internasional bukan memiliki anggota dan PK yang banyak.

Ditambah dengan masalah-masalah internal lainnya yang terakumulasi pada kesimpulan saya, bahwa KSBSI tidak mungkin bisa dibangun kembali menjadi kuat dan besar dengan AD/ART beserta pola yang sekarang (tahun 2011), saya keluar dari MPO KSBSI dan Mendeklarasikan Kembali ke SBSI I (lihat bab-bab berikutnya). Setelah pergumulan panjang, tanggal 2 Desember 2012 saya dan kawan-kawan mendeklarasikan kembali ke SBSI AD/ART Kongres IV bertempat di gedung Juang, dan saya menjadi Ketua

Umum DPP SBSI. Konsolidasi selanjutnya adalah Kongres V SBSI di Hotel Acacia Jakarta, saya kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP SBSI masa kerja 2014-2018. Yang salah satu butir penting Kongres V SBSI adalah mencalonkan Joko Widodo menjadi Presiden RI pada pemilihan umum 2014, dalam rangka pencalonan Joko Widodo, SBSI ikut berinisiatif mendirikan BaraJP (Barisan Relawan Jokowi for President).

Sejak 2 Desember 2012, SBSI menjadi tiga, yakni SBSI yang dipimpin Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum DPP SBSI, KSBSI yang dipimpin Mudhofir sebagai Presiden DEN KSBSI, dan SBSI92 yang dipimpin Sunarti sebagai Ketua Umum DPP SBSI92. Tetapi sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tertanggal 27 Juli 2015, KSBSI secara juridis tidak ada lagi paling sedikit menjadi ilegal. Karena amar putusan tersebut berbunyi "Melarang KSBSI dan federasi-federasinya menggunakan nama SBSI, logo SBSI, mars SBSI dan tridharma SBSI" dan "memakai nama SBSI, logo SBSI, mars SBSI dan Tridharma SBSI tanpa seijin Muchtar Pakpahan adalah perbuatan melawan hukum".

Sementara di pihak lain, sejak September 2015, SBSI dan SBSI92 menyatu kembali dengan tahap awal bersama dalam Dewan SBSI. Dengan kata lain SBSI dan SBSI92 telah menyatakan bersatu kembali dalam Dewan SBSI yang disepakati sebagai penyatuan tahap awal. Itu berarti secara formal, sejak November 2015, hanya satu SBSI yang dipimpin Muchtar Pakpahan sebagai Ketua dan Sunarti sebagai Sekretaris.